

H A R I A N

**LENTERA***Inspirasi Perubahan* **TODAY**

EDISI KAMIS / 24 Desember 2020

HARIAN UNTUK UMUM  
TERBIT SENIN-JUMAT  
12 HalamanE-mail [redaksi@lenteratoday.com](mailto:redaksi@lenteratoday.com)  
Redaksi 031-87854491  
Iklan 031-87854491  
Kantor Redaksi  
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26  
SurabayaSelama tidak  
menyebarkan kebohongan  
dan merugikan orang lain,  
berkaryalah jangan takut  
dibilang jelek.

Soleh Solihun, Aktor &amp; Komedian

Direksi &amp; Karyawan L-Media Group mengucapkan

**SELAMAT NATAL 2020  
& TAHUN BARU 2021**

Semoga keberkahan menyertai kita semua

**L MEDIA**  
GROUP**MENSOS RANGKAP JABATAN WALIKOTA SURABAYA  
LEBIH ELOK RISMA MUNDUR**

SCAN ME

Pelantikan 6 menteri baru Kabinet Jokowi resmi dilakukan Rabu (23/12). Tri Rismaharini langsung mendapatkan sorotan tajam. Sebab, meski sudah menduduki kursi Menteri Sosial (Mensos), Risma rupanya masih rangkap jabatan sebagai Walikota Surabaya. Pengganti Juliari Batubara ini mengaku sudah mengantongi izin dari presiden. Sesuai 2 undang-undang yaitu UU Kementerian Negara dan UU Pemda, Kepala Daerah dilarang rangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Artinya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, harus segera memberhentikan Risma dari jabatan Walikota. Atau, lebih elok lagi bila 'Emake Arek Suroboyo' ini mundur dari jabatannya di Kota Pahlawan.

Baca Hal 11

**WALIKOTA  
SURABAYA****MENTERI  
SOSIAL****PENGUMUMAN**

Diberitahukan kepada pembaca setia Harian Lentera Today, pada Jumat (25 Desember 2020) kami tidak terbit memperingati Hari Natal 2020. Terbit kembali pada Senin (28 Desember 2020). Update berita bisa terus diikuti melalui [www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com).

**ATURAN LARANGAN RANGKAP JABATAN**UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  
Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitu pula aturan di UU Pemda yang melarang kepala daerah merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Aturan itu ada di Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Pemda yang berbunyi:

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU ASN, menteri dan wali kota merupakan pejabat negara. Aturan tersebut tertulis di Pasal 122 huruf j dan m UU ASN yang berbunyi:  
Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:  
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri.  
m. Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil walikota.  
Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 78 ayat (2) huruf g

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 11 BULAN BURONAN, HARUN MASIKU JADI 'UTANG' SETAHUN KPK ERA FIRLI

Jakarta- Belum tertangkapnya Harun Masiku menjadi catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) di satu tahun kepemimpinan Firli Bahuri cs di KPK. Harun Masiku yang merupakan mantan caleg PDIP itu sudah menjadi buron sejak 17 Januari 2020 atau 11 bulan lalu. Hingga saat ini, keberadaannya bak ditelan bumi dan belum berhasil ditangkap.

ICW menyinggung bagaimana KPK dahulu berhasil menangkap buronan sekaliber eks Bendahara Demokrat, Nazaruddin, meski berada di luar negeri. Seraya mempertanyakan mengapa belum juga berhasil menangkap Harun.

"Selama ini KPK dikenal cepat dan profesional ketika mengungkap ataupun menangkap buronan. Kita bisa berkaca pada kasus Nazaruddin, 77 hari di Kolombia tetap bisa ditangkap oleh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring di Facebook, Rabu (23/12).

Terkait Nazaruddin, ia berhasil ditangkap di Cartagena, Kolombia, pada 7 Agustus 2011. Ia merupakan mantan terpidana di kasus korupsi proyek Hambalang. Nazarudin menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT DGI.

Nazaruddin diduga memenangkan lelang PT DGI untuk proyek di kemenpora itu yang nilainya capai Rp 191 miliar. Atas perbuatannya, Nazarudin divonis 7 tahun penjara di tingkat kasasi MA pada Januari 2013. Saat ini, ia sudah bebas.

Terlepas dari itu, Kurnia mengatakan saat ini ada lima buronan yang belum berhasil

ditangkap KPK. Selain Harun Masiku, ada Samin Tan; Idzil Azar; Sjamsul Nursalim; dan Itjih Nursalim. Masih banyaknya buronan ini dinilai oleh Kurnia dikarenakan sejumlah masalah.

Pertama, terkait pimpinan KPK yang dinilai pernyataannya menciptakan situasi yang tak serius dalam pencarian buronan. Terkait itu, Kurnia menyinggung insiden di PTIK, Jakarta Selatan, di mana saat itu ada dugaan penyidik KPK ditahan oleh petugas keamanan di sana.

"Saya ingin mulai dari Firli Bahuri. Ketika dilakukan pencarian terhadap Harun Masiku dan seseorang yang diduga petinggi partai politik di PTIK, ada dugaan pengekangan di sana tapi Firli sampai hari ini kan tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di sana," ucap Kurnia.

Terkait kejadian itu, Kurnia membandingkan langkah Pimpinan KPK era 2011-2015 saat ada dugaan penyidik tidak diberikan akses saat menggeledah kantor Korlantas Polri. Saat itu, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi Simulator SIM.

"Tatkala ingin menggeledah kantor Korlantas Polri saat itu 3 orang pimpinan KPK atau 2 orang, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas langsung datang mendatangi Korlantas untuk menjamin para penyidiknya bisa bekerja tidak ada intervensi," kata Kurnia.

"Tetapi komisioner KPK hari ini berbeda justru membiarkan jika memang ada dugaan

penyekapan seperti itu (PTIK), itu di konteks Firli," sambungnya.

Selain itu, pernyataan pimpinan KPK lainnya disinggung oleh Kurnia yakni dari Nurul Ghufron. Ia menyatakan, sempat ada niatan untuk melakukan sidang in absentia terhadap Harun.

"Nurul Ghufron dia sempat menyampaikannya ada niatan untuk menyidangkan in absentia dari Harun Masiku. Tentu statement ini keliru secara mendasar ya karena belum ada pencarian yang masif kok tiba-tiba berbicara soal in absentia padahal keterangan dari Masiku itu sangat dibutuhkan oleh KPK," ucapnya.

Terkait kebuntuan pencarian Harun Masiku ini, Kurnia menyarankan kepada Dewan Pengawas untuk segera mengevaluasi pimpinan KPK yang bertanggung jawab di bidang penindakan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan.

Selain itu, Satgas pemburu Harun Masiku pun didesak untuk diganti dengan satgas baru yang berpengalaman dan berprestasi menangkap buronan.

"Soal pergantian satgas karena satgas yang ditugasi mencari beberapa orang itu tidak cukup maksimal kinerjanya lebih baik digantikan saja dengan tim yang selama ini terbukti oke seperti tim yang dipimpin Mas Novel Baswedan," pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Penindakan Karyoto yakin pihaknya bisa menangkap Harun Masiku, cepat atau lambat. "Tinggal tunggu apesnya," kata Karyoto, Jumat (23/10). (ist)

## 5 BURONAN KPK YANG BELUM TERTANGKAP

### HARUN MASIKU

(tersangka kasus suap kepada eks komisioner KPU Wahyu)

### SAMIN TAN

(tersangka kasus suap mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih)

### IDZIL AZAR

(tersangka gratifikasi terkait Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode 2007-2012)

### SJAMSUL NURSALIM

(tersangka korupsi pemenuhan kewajiban obligor BLBI)

### ITJIH NURSALIM

(tersangka korupsi pemenuhan kewajiban obligor BLBI)

## TANGKAPAN 'KAKAP' KPK ERA FIRLI BAHURI

### Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menjadi pejabat negara pertama yang terjaring OTT KPK di era Firli. Saiful ditangkap pada 7 Januari 2020.

### Komisioner KPU, Wahyu Setiawan

Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, ditangkap KPK sehari setelah OTT Saiful Ilah, tepatnya pada 8 Januari 2020. Wahyu ditangkap di dalam pesawat Batik Air saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanjung Pandan, Bangka Belitung.

### Pejabat UNJ, Dwi Achmad Noor

Saat 2 OTT awal KPK begitu meyakinkan, tak demikian dengan OTT ketiga yang bisa dibilang berantakan. Setelah

dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, kepolisian pun menghentikan perkara tersebut karena dinilai tidak cukup bukti.

### Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Fergusih

OTT keempat KPK era Firli terjadi pada 3 Juli 2020. Ketika itu, KPK menangkap pasangan suami-istri Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Fergusih.

### Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

KPK menangkap Menteri KP, Edhy Prabowo, pada 25 November dini hari di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Edhy ditangkap usai tiba dari Hawaai, AS, bersama 16 orang lain. Penangkapan



Edhy dilakukan setelah 4 bulan KPK puasa OTT.

- **Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna**  
Dua hari setelah OTT Edhy, KPK menangkap Wali Kota Cimahi, Ajay Priatna. Ajay ditangkap bersama beberapa orang lain pada 27 November.
- **Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo**  
Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, menjadi kepala daerah selain Ajay yang ditangkap KPK dalam OTT beberapa hari terakhir. Ia ditangkap bersama 15 orang lain pada 3 Desember.

## KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL BARU

### DPR BILANG PETRUS GOLOSE MUMPUNI, INGATKAN 'PR BERAT'

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Irjen Pol Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) baru, Rabu (23/12) menggantikan Komjen Heru Winarko yang pensiun sejak 1 Desember lalu. Sepanjang karier kepolisiannya, dia diketahui memiliki banyak pengalaman dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. DPR RI pun mengingatkan banyak 'PR' besar yang harus segera dituntaskan.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengaku mengapresiasi pilihan Presiden Jokowi. "Dedikasi dan komitmen Irjen Pol Petrus Golose dalam pemberantasannarkoba tidak bisa diragukan lagi. Kita bisa berharap banyak kiprah beliau selanjutnya saat memimpin BNN ke depan bisa menekan praktik-praktik peredaran dan penggunaan narkoba di tanah air," ujar Eva Yuliana dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/12).

Eva berpesan kepada Kepala BNN yang baru agar lebih antisipatif terhadap metode dan sistem peredaran narkoba belakang ini. Pasalnya, mereka semakin rapi dan sulit ditembus. Dan pola penggunaan atau penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat pun kian variatif dan beragam.

"Saya percaya Irjen Pol Petrus Golose dan jajarannya di BNN mampu mengemban amanat dan pesan masyarakat Indonesia," cetusnya.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini Komjen Pol Petrus Golose mumpuni menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) karena memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik khususnya dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan narkoba. "Saya berharap ke depannya BNN yang dikomandoi Pak Petrus semakin sigap memberantas mafia-mafia narkoba," katanya.

Dia mengatakan Petrus memiliki pengalaman dan kapasitas dalam memimpin sebuah institusi. Sahroni mencontohkan, Petrus

terbukti sukses mengemban amanah sebagai Kapolda Bali selama 4 tahun. "Pak Petrus terbukti sukses menjadi Kapolda Bali selama 4 tahun dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Bali," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai Petrus Golose memiliki komunikasi yang baik sehingga diyakininya dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan narkoba. "Pak Petrus untuk komunikasi sangat baik dan beliau orangnya rendah hati," katanya.

Untuk diketahui, Sebelumnya, perwira yang banyak berkecimpung di dunia reserse ini merupakan Kapolda Bali. Petrus tercatat sebagai lulus Akademi Kepolisian (Akp) 1998. Petrus termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005 silam.

#### Kinerja BNN 2020

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan capaian selama 2020 terkait penegakan hukum kasus tindak pidana narkoba. Sejauh ini, BNN telah memetakan 92 jaringan sindikat narkoba, unkap 806 kasus, hingga menyita 1,12 ton sabu.

Dari 92 sindikat itu, 88 jaringan telah berhasil diungkap. Dari 88 jaringan narkoba yang telah diungkap, lanjutnya, 14 merupakan jaringan internasional dan 27 orang lainnya adalah pelaku sindikat yang bergerak di dalam lapas. Berangkat dari jaringan tersebut, BNN berhasil mengungkap 806 tindak pidana narkoba dengan total tersangka 1.247 orang.

Ada 1,12 ton sabu, 2,36 ton ganja, dan 340.357 butir ekstasi yang berhasil disita BNN sepanjang 2020. Lalu, lanjutnya, BNN juga telah memusnahkan sebanyak 30,5 hektare lahan ganja dan juga 213.045 batang ganja. (ist,ins)



#### IRJEN PETRUS REINHARD GOLOSE (KEPALA BNN BARU)

##### TTL

Manado, Sulawesi Utara, 27 November 1965

##### LULUSAN

Akademi Polisi (Akp) 1988.

##### HARTA (26 MEI 2020)

Rp 12.540.901.169

- 9 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bogor, Makassar, dan Manado. Total harta tidak bergerak itu mencapai Rp 15.704.790.000.
- 2 mobil yakni, Toyota Harrier tahun 2005 senilai Rp 130 juta, dan Jeep Wrangler tahun 1995 senilai Rp 150 juta. Sehingga totalnya Rp 280 juta.
- Harta bergerak lainnya senilai Rp 300 juta. Kas dan setara kas lainnya yang dia laporkan senilai Rp 956.111.169. Namun, Petrus juga tercatat memiliki utang senilai Rp 4,7 miliar.

##### KARIER

- Kapolda Bali
- Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dan Direktur Penindakan BNPT.

## BNN SIKAT 88 JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA SELAMA 2020

- BNN berhasil mengungkap **806 kasus** tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak **1.247 orang**
- Sebanyak **88 jaringan sindikat** telah berhasil di unkap, di mana 14 di antaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional
- Memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai **30,5 hektar** dan barang bukti tanaman ganja sebanyak **213.045 batang**

### BARANG BUKTI

-  **2,36**  
Ton Daun Ganja
-  **340.357**  
Butir Ekstasi
-  **1,12**  
Ton Sabu

Aset yang berhasil disita BNN dari TPPU kasus narkoba pada 2020 mencapai

**Rp. 86.022.409.817**

## LIBUR NATARU DI TENGAH PANDEMI

## 61 OBJEK WISATA DI KABUPATEN BLITAR TETAP BUKA

**B**LITAR – Meskipun pandemi Covid-19 masih menghantui, sebanyak 61 objek wisata di Kabupaten Blitar, tetap buka saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Namun, protokol kesehatan (protkes) akan diterapkan dengan ketat. Salah satunya membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas.

Seperti disampaikan Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Blitar, Krina Yekti jika sesuai dengan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar kepada pengelola destinasi wisata, disebutkan jika tempat wisata tetap boleh buka pada libur Nataru. "Tetap boleh buka, tetap dengan penerapan protkes Covid-19 ketat," ujarnya, Rabu (23/12).

Dalam surat No. 556/1018/409.103/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani Asisten Administrasi Umum, Mahadin atas nama Bupati Blitar dan Sekretaris Daerah tersebut, ada 4 poin yaitu menerapkan 3 M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) pada destinasi wisata yang beroperasi dan mengintensifkan satgas internal destinasi wisata. Selain itu juga membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas, serta berkoordinasi dengan Puskesmas atau RS terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang membutuhkan pertolongan medis.

Alasan tetap dibukanya destinasi wisata tersebut, karena adanya komitmen dari para pengelola untuk menerapkan dan mematuhi protkes secara ketat. "Karena sudah komitmen,



Salah satu destinasi wisata unggulan Pantai Tambakrejo di Kabupaten Blitar

mereka (pengelola destinasi wisata) juga siap menerima sanksi jika melanggar," jelasnya.

Apakah juga diberlakukan syarat Rapis Test Antigen pada wisatawan yang akan ke Kabupaten Blitar? Krina mengaku tidak ada. "Karena dalam surat kepada pengelola destinasi wisata, tidak ada aturan seperti itu," ungkap Krina.

Selain itu saat ini sesuai peta sebaran Covid-19 yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, kondisi sebagian besar kecamatan sudah zona hijau. Hanya 4 kecamatan yang merah yaitu Kecamatan Nglegok, Talun, Gandusari dan Doko. Kemudian 3 kecamatan zona orange, diantaranya Srengat, Ponggok dan Udanawu, sisanya 15 kecamatan masuk zona hijau.

Secara terpisah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

Disparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda ketika dikonfirmasi mengenai tetap dibukanya destinasi wisata ini membenarkan, bahkan jumlahnya mencapai 61 lokasi. "Terdiri dari 29 destinasi wisata yang dikelola swasta, pribadi maupun BUMN. Kemudian 32 destinasi wisata sejarah yaitu candi, yang dikelola Badan Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jatim di Trowulan, Mojokerto," kata Huda.

Ditanya mengenai adanya pembatasan pengunjung maksimal 50%, sesuai dengan surat kepada pengelola wisata. Huda mengaku nanti tim yang terdiri dari OPD terkait bersama Satgas Covid-19, akan berkeliling melakukan pengawasan di lokasi. "Karena untuk bisa membuka kembali lokasi wisata, harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 dan Diparbuppora. Ada persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi, kalau melanggar akan dikenakan sanksi," tandas Huda.

Adapun 29 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar terdiri dari wisata alam, seperti pantai, perkebunan, goa dan air terjun. Kemudian wisata buatan seperti bendungan, kampung coklat dan Blitar Park. Serta wisata sejarah, diantaranya candi-candi dan Gong Pradah.

Bahkan Huda menegaskan 29 destinasi wisata yang tetap buka pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2021 tersebut, sudah mengantongi rekomendasi. "Sanksinya kalau melanggar protkes Covid-19, mulai dari teguran sampai paling berat pencabutan izin operasional," tegasnya. (ais)

## DOKTER WANTI-WANTI POTENSI RS KOLAPS, SURABAYA ANCAM PELANGGAR PROTOKES

**S**URABAYA – Makin meluasnya penularan virus Covid-19 membuat kalangan dokter khawatir Rumah Sakit (RS) kolaps karena kehabisan ruang inap dan minimnya tenaga medis. Mengantisipasi hal itu, Pemkot Surabaya akan menerbitkan Perwali yang berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

"Faktanya angka Covid-19 meroket lagi, kisaran pertambahan setiap harinya 6-7 ribu kasus secara nasional. Covid-19 ini belum selesai," kata Ketua IDI Surabaya dr Brahmana Askandar SpOG(K), Rabu (23/12).

Menurut Brahmana, adaptasi kebiasaan baru yang digaungkan pemerintah sejak pertengahan tahun lalu harus dibarengi dengan penerapan prokes ketat. Sayangnya, makin lama masyarakat sering lalai terutama dalam hal menggunakan masker dengan benar.

"Faktanya, orang-orang masih kadang melepas maskernya. Nah fase melepas masker itu adalah fase vital, dimana virus bisa masuk melalui saluran pernapasan kita dan virus masuk ke dalam tubuh kita," ucapnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang

menimbulkan massa atau berkerumun. Karena hal tersebut dapat mempercepat penularan virus.

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan Perwali terkait pelanggaran protokol kesehatan. Nantinya aturan itu akan menindak tegas masyarakat yang tak patuh.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominformo) Surabaya M. Fikser mengatakan bahwa perwali nantinya diharapkan untuk bisa menurunkan angka kasus baru corona. "Perwali baru yang mengaturnya lebih mendalam. Kalau perwali yang lama kan masih ada area abu-abu," katanya, Rabu (23/12).

Fikser menjelaskan, nantinya aturan denda tidak hanya ditujukan untuk perseorangan melainkan badan usaha yang mana dalam melaksanakan kegiatan melanggar protokol kesehatan. "Nominal denda ditentukan berdasar klasifikasi. Untuk badan usaha, misalnya, klasifikasi ditentukan dalam kategori bawah, sedang, dan atas. Jadi, nilainya berbeda-beda sesuai kategori," jelas Fikser.



Ketua IDI Surabaya dr Brahmana Askandar SpOG(K)

Terkait besaran denda, pihaknya belum bisa mengungkapkan. Prinsipnya, sambung Fikser, mekanisme itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera ke pelanggar. Sebab, berdasar hasil evaluasi, selama ini masyarakat cenderung lebih takut kalau diberi sanksi berupa denda.

Selain sanksi denda, Pemkot nantinya juga akan mencabut izin operasional bagi perusahaan yang tidak patuh protokol kesehatan. Izin operasional kembali diberikan jika lembaga tersebut mentaati protokol kesehatan. (Ard)

## SUDAH ADA 131 PERMOHONAN SENGKETA HASIL PILKADA 2020 DI MK

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 131 permohonan sengketa hasil Pilkada 2020. Hal itu ia katakan berdasarkan hasil pemantauan KPU di laman resmi www.mkri.id hingga 23 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.

"Ada 131 permohonan," kata Hasyim pada wartawan, Rabu (23/12). Adapun 131 permohonan itu terdiri dari tiga permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur. Lalu, 14 permohonan sengketa hasil pemilihan wali kota dan 114 sengketa hasil pemilihan bupati.

Sebelumnya, Hasyim mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilkada 2020. Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) sebagai bentuk persiapan.

"Rakor dilaksanakan secara internal dan eksternal, rakor internal KPU dengan KPU Provinsi atau Kabupaten atau Kota penyelenggara pilkada dan Rakor eksternal KPU dengan MK," kata Hasyim. Adapun bintek dilaksanakan secara internal dan eksternal bintek internal dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU provinsi, kabupaten atau kota penyelenggara pilkada.

### Netralitas Paling Disorot

Sementara itu, secara umum netralitas penyelenggara pemilu, penggelembungan suara, penerangan pemilih, hingga tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) menjadi sorotan mayoritas calon kepala daerah yang mengajukan gugatan ke MK.

Hal ini tampak dari dari sejumlah pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHPKada 2020) yang didaftarkan langsung oleh pasangan calon kepala daerah atau pun tim kuasa hukumnya.

Salah satu contoh yang menarik disampaikan oleh Mudarwan Yusuf, kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua Gusril Pausi-Medi Yuliardi, yang merupakan petahana dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Dikutip dari laman resmi MK, Rabu (23/12) pemohon mengatakan pihak penyelenggara telah bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Kaur, antara lain menghambat proses penyerahan surat keputusan KPU tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon.

Menurut Mudarwan, pihaknya telah meminta dokumen resmi KPU Kabupaten Kaur tentang penetapan hasil perolehan suara, namun oleh penyelenggara dokumen tersebut tidak kunjung diserahkan. Mudarwan menilai tindakan tersebut merupakan upaya dari penyelenggara agar pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke MK.

Selain itu, Mudarwan mengatakan ada penerangan masa pemilih dari luar kabupaten Kaur oleh pasangan calon lain. Dia menambahkan, selain ada penerangan masa pemilih, juga terjadi penggunaan hak pilih

## BEBERAPA DAERAH YANG MELAKUKAN GUGATAN PILKADA 2020

1. PHP Bupati Lampung Tengah
2. PHP Bupati Kaimana
3. PHP Bupati Musi Rawas
4. PHP Bupati Bulukumba
5. PHP Bupati Karo dengan pemohon Joshua Ginting
6. PHP Bupati Karo dengan pemohon Iwan Sembiring
7. PHP Bupati Konawe Kepulauan
8. PHP Bupati Ogan Komering Ulu (OKU)
9. PHP Bupati Halmahera Selatan
10. PHP Bupati Banggai
11. PHP Bupati Pulau Taliabu
12. PHP Bupati Sekadou
13. PHP Wali Kota Tidore Kepulauan
14. PHP Bupati Kotawaringin Timur
15. PHP Bupati Pangandaran
16. PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
17. PHP Bupati Raja Ampat
18. PHP Bupati Belu
19. PHP Bupati Sumba Barat
20. PHP Bupati Rembang
21. PHP Bupati Tapanuli Selatan
22. PHP Bupati Lingga
23. PHP Bupati Magelang
24. PHP Wali Kota Magelang
25. PHP Bupati Malaka
26. PHP Wali Kota Bandar Lampung
27. PHP Bupati Halmahera Timur dengan pemohon Thaid Djalaluddin
28. PHP Bupati Pohuwato
29. PHP Bupati TojoUna-Una
30. PHP Bupati Purworejo
31. PHP Bupati Halmahera Timur dengan pemohon Abdu Nasar
32. PHP Bupati Sorong Selatan
33. PHP Bupati Teluk Wondama
34. PHP Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan
35. PHP Bupati Konawe Selatan
36. PHP Bupati Mamberamo Raya
37. PHP Bupati Sorong Selatan
38. PHP Bupati Labuhanbatu Selatan
39. PHP Bupati Kepulauan Aru
40. PHP Bupati Pesisir Barat

yang tidak semestinya, dimana banyak pemilih yang telah meninggal namun digunakan untuk memilih pasangan calon nomor urut satu.

Kasus lain, terjadi di dalam permohonan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan calon nomor urut empat Rustam Akili-Dicky Gobel. Rustam yang datang langsung didampingi kuasa hukumnya Duke Arie, mengatakan bahwa KPU tidak netral dalam pilkada Kabupaten Gorontalo. (ist)

## DINDIK JATIM EVALUASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH

SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menggelar refleksi pendidikan sebagai evaluasi jalannya pendidikan di Jatim setahun terakhir. Khususnya dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan sejak pandemi.

Kepala Dindik Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengungkapkan melalui kegiatan Refleksi Pendidikan 2020 dengan narsum dari akademisi, Komisi E, PGRI Jatim hingga dewan pendidikan diharapkan ditemukan formula tepat sekolah di era pandemi ini. "Secara umum PJJ masih mengalami penurunan kualitas pendidikan. Mungkin karena tahun 2020 menjadi tahun pertama. Sehingga guru belum siap secara materi, siswa juga belum siap menerima materi online," tegasnya di sela acara Refleksi Pendidikan tahun 2020 yang diselenggarakan Dindik Jatim di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (23/12).

Sehingga daya tangkap siswa tidak optimal, apalagi untuk mata pelajaran seperti Kimia, Fisika dan Matematika dan juga materi ke-trampilan. "Makanya Jatim mulai menggelar pembelajaran tatap muka dan hasil evaluasinya bagus sehingga mulai ditingkatkan lagi," ungkapnya menyoroati pembahasan refleksi

pendidikan tahun 2020 ini

Menurutnya, jika pembelajaran tatap muka tidak dilakukan, akan mengganggu tumbuh kembang siswa dalam belajar dan membuat siswa mengalami learning lost. Serta meningkatkan anak putus sekolah. "Saya pernah dihubungi orang tua di Madura yang bilang anaknya ke Surabaya. Sehingga mereka menanyakan apa SMA/SMK sudah bubar dan banyak siswa yang kemudian dipindahkan ke pesantren sama orang tua. Psikososial dan kekerasan pada anak juga meningkat. Sehingga Jatim selalu mengevaluasi uji coba tatap muka," tegasnya.

Terpisah, Pakar Pendidikan Jatim, Prof Moh Nuh mengungkapkan, ada tiga langkah yang harus disiapkan stakeholder pendidikan selama pembelajaran jarak jauh. Di antaranya, literasi digital bagaimana ke-pahaman tenaga pendidik terkait digital termasuk filosofi digital era pembelajaran daring ini.

"Selain itu, ketersediaan infrastruktur digital harus memadai. Sehingga sekolah-sekolah yang ada di Jatim pastikan yang namanya sinyal harus tersedia," ujar Prof Nuh, usai mengisi



Kepala Dindik Jawa Timur, Wahid Wahyudi

Tak hanya itu, ia juga mengatakan, jika pemberian subsidi internet secara khusus selama pelaksanaan pembelajaran daring. "Semuanya sepakat, migrasi digital bukan pilihan tapi keharusan. Karena faktanya, mau tidak mau model pembelajaran kita harus beralih ke digital. Seandainya Covid-19 sudah rampung, paling tidak hybrid. Paduan tatap muka dan virtual," jabarnya.

Namun, ditegaskan Prof Nuh ada beberapa hal yang perlu dicermati para pemangku pendidikan. Sebab, ia menilai, orang sekolah setidaknya mendapatkan tiga poin utama. Yakni attitude, knowledge dan skill. Karena harus beralih ke digital, ia meminta agar pemprov, pemkot/pemkab harus melihat jeli kebijakan case by case. (ist, ins)



# Budi Sadikin

**DARI SARJANA NUKLIR  
HINGGA MENTERI KESEHATAN**

**B**udi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri I BUMN dipercaya Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto - jenderal berbintang tiga di Kabinet Indonesia Maju.

Budi Gunadi Sadikin menghadapi tugas besar di depan mata, yakni menyelesaikan masalah penanganan pandemi Covid-19 dan juga prioritas masalah kesehatan lainnya, seperti tunggakan klaim dan tata kelola keuangan BPJS Kesehatan.

Masih banyak pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang akan menjadi tantangan besar bagi Budi, sosok ahli keuangan yang pernah memimpin PT Bank Mandiri Persero Tbk. dan juga PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Budi Gunadi Sadikin, kelahiran 8 Juli 1964 dikenal sebagai bankir senior yang berpengalaman. Budi sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Fisika Nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Perjalanan karier Budi dimulai pada tahun 1988 dengan menjadi Staf Teknologi Informasi IBM Asia Pasifik, Tokyo, Jepang. Setelah itu, Budi dipindah ke IBM Indonesia

dengan jabatan terakhir sebagai System Integration & Professional Services Manager.

Kemudian karier Budi Gunadi Sadikin berlanjut di Bank Bali dengan beberapa jabatan sebagai General Manager Electronic Banking Wilayah Jakarta dan Chief General Manager Human Resources hingga 1999.

Setelah itu, Budi bergabung dengan ABN Amro Bank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Consumer Banking hingga 2004.

Selanjutnya, dia menjadi Executive Vice President Consumer Banking di Bank Danamon dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance.

Pada tahun 2006, Budi bergabung ke Bank Mandiri. Sebelum menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada tahun 2013, jabatannya adalah Direktur Mikro dan Retail Banking. Pada tahun 2016, Budi menjadi Staf Khusus Menteri BUMN Rini Sumarno.

Pada Kabinet Indonesia Maju 2019—2024, Budi dipercaya Presiden menjadi Wakil Menteri I BUMN dan juga Ketua Satgas PEN. Kini, Budi akan melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Menteri Kesehatan RI.

Jabatan yang baru diemban sebagai Menkes bisa dibilang merupakan per-

taruhan karier dari sosok bankir berpengalaman itu. Pasalnya, pandemi Covid-19 kini menjadi masalah yang paling krusial dan menyangkut keselamatan jiwa jutaan rakyat Indonesia dan juga dunia.

Pandemi Covid-19 telah membuat Tanah Air ditempa dua krisis sekaligus: krisis kesehatan masyarakat dan krisis ekonomi. Krisis ini pula yang mengantar Indonesia ke jurang resesi ekonomi untuk pertama kali sejak krisis 1998.

Selama 10 bulan pandemi Covid-19 di Indonesia, tak terhitung berapa banyak sumber daya yang telah dikerahkan oleh Pemerintah guna mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini. Banyak pihak meragukan kepemimpinan Terawan sebagai Menkes dalam menangani pandemi ini.

Presiden akhirnya membuat keputusan untuk mengganti Terawan dengan sosok Budi Gunadi Sadikin. Selain Wakil Menteri I BUMN, Budi juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Budi yang namanya melejit sejak menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri memang kerap mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi (Ant).



# PIKA, GANGGUAN MAKAN TAK LAZIM DISEBABKAN **KURANG ZAT BESI**



Foto : Helena Lopes/Unsplash

**C**oba perhatikan kebiasaan makan orang di sekitar Anda termasuk anak Anda, apa selama ini dia suka menyantap sesuatu yang sebenarnya bukan makanan, semisal sabun, pasir, rambut hingga cat?

Jika iya, ada kemungkinan dia mengalami pika alias gangguan menyantap sesuatu yang tak bernilai nutrisi atau bahkan tergolong berbahaya semisal cat kering, sabun, pasir hingga batu dan bisa berujung keracunan.

Laman Healthline mencatat, pika kebanyakan dialami anak-anak dan wanita hamil serta sifatnya bisa hanya sementara. Keinginan memakan sesuatu tak biasa bisa menjadi pertanda tubuh mencoba mengisi kembali tingkat nutrisi yang rendah salah satunya zat besi.

Khusus pada anak, selain bisa berbahaya, pika juga bisa menyulitkannya bergaul dengan rekan sebayanya. Psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani mengatakan, Anda bisa membayangkan ketika anak bermain dengan temannya lalu tiba-tiba memakan batu bata, pasti dia akan dianggap aneh dan akhirnya berujung sulit bersosialisasi.

Untuk mendeteksi pika sebenarnya tak ada tes khusus, tetapi dokter akan mendiagnosis berdasarkan beberapa faktor dan riwayat pasien termasuk kebiasaan menyantap benda-benda bukan makanan.

Dokter bisa juga meminta pasien melakukan tes darah melihat kadar zat besi atau

zinc-nya, misalnya uji saring untuk sekaligus mengetahui level hemoglobin.

### **Pencegahan dan penanganan**

Pika akibat kekurangan zat besi bisa dicegah melalui asupan nutrisi seimbang terutama dari makanan yang mengandung zat besi seperti sumber protein hewani semisal hati sapi atau ayam, daging sapi atau kambing, kuning telur, daging unggas, ikan, udang dan tiram.

Dokter spesialis gizi dan Ketua Departemen Ilmu Gizi FK UI, Nurul Ratna Mutu Manikam menyebut, dalam beberapa kasus defisiensi besi dan zinc atau nutrisi lain bisa berhubungan dengan pika ini

Nurul mengatakan, protein hewani ini bisa dilengkapi dengan protein nabati semisal kacang-kacangan yakni kedelai, kacang hijau, sayuran hijau dan biji-bijian.



Daging sapi



Menurut Nurul, untuk meningkatkan penyerapan zat besi, diperlukan nutrisi lain semisal protein, vitamin C untuk membantu mengubah zat besi dari makanan menjadi yang siap diserap ke dalam usus, kemudian vitamin B6 dan B1 serta asam folat untuk mencegah anemia dan seng.

Di sisi lain, perhatikan juga bahan-bahan yang bisa menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh antara lain: tannin yang biasanya terkandung dalam teh atau kopi, asam oksalat seperti dalam berry, cokelat dan teh, lalu fitat yang umum terdapat dalam biji-bijian.

Jika ternyata pika yang seseorang alami disebabkan kekurangan nutrisi termasuk zat besi, maka dokter juga bisa meresepkan vitamin atau suplemen, misalnya suplemen zat besi jika dia mengalami anemia defisiensi besi.

Sebuah studi dalam Journal of Applied Behavior Analysis pada tahun 2000 menyatakan, suplemen multivitamin sederhana bisa menjadi pengobatan yang efektif dalam beberapa kasus pika (Ant).

Foto : Steve Johnson/Unspalsh



## HUAWEI IKUTI TREN MENGHILANGKAN CHARGER

Apple sepertinya memulai tren baru dalam industri ponsel pintar dengan menghilangkan adaptor pengisi daya (charger) dalam kemasannya.

Setelah Apple, Samsung dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Apple tersebut. Kini, Huawei tampaknya

akan melakukan hal yang sama.

Dilansir dari phonearena.com, laporan ITHome (via GizmoChina) menunjukkan bahwa produsen ponsel asal China itu sedang melakukan survei untuk menanyakan seberapa penting aksesoris ponsel, termasuk earphone dan kabel charger tipe C dibeli dalam satu kemasan bersama.

Pertanyaan lainnya adalah kisaran harga yang akan dibebankan kepada konsumen jika sebuah ponsel dikirim tanpa adaptor pengisi daya. Huawei juga menanyakan tentang apakah ketiadaan charger akan mempengaruhi keputusan untuk membeli produknya.

Meski survei tersebut tidak menunjuk secara jelas mengenai ponsel pintar, tetapi sejumlah rumor yang mengemuka menyebutkan bahwa kemungkinan besar Huawei akan

mengikuti langkah iPhone.

Hal yang sama dilakukan Apple sebelum memutuskan untuk menghilangkan charger dalam kemasan iPhone.

Produsen gawai asal Cupertino, Amerika Serikat, juga melakukan survei yang menanyakan apa yang dilakukan konsumen dengan charger lama mereka yang kemudian diikuti dengan menghilangkan power adapter dari Apple Watch Series 6 dan Apple Watch SE.

Apple mengklaim upaya tersebut merupakan bagian dari kampanye lingkungan, meski tak menyangkal bahwa hal itu memangkas biaya operasional dan memacu pendapatan.

Jika Huawei dan Samsung nantinya mengaplikasikan langkah ini, maka tidak butuh waktu lama hingga semua produsen ponsel pintar akan melakukan hal serupa (Ist).



Aksesori MagSafe berupa folding charger (Apple)



Foto : Ilya Pavlov / Unsplash

JANGAN ASAL

WARNAI RAMBUT

# KENALI DULU SEDERET SKIN TONE DASAR INI

Sebagian besar perempuan menaruh perhatian lebih terhadap rambutnya. Mulai dari melakukan perawatan sedemikian rupa agar rambut tetap sehat hingga melakukan eksplorasi seperti mewarnai rambut. Berbicara mengenai warna rambut, tak sedikit perempuan yang mengikuti

tren saat memilih warna.

Mewarnai rambut memang tidak bisa asal membalurkan warna. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari warna rambut, kamu harus mencocokkan dengan skin tone. alhasil, warna rambut akan memberikan kesan yang berbeda dan natural pada

penampilan.

Ada dua jenis skin tone, di antaranya cool tone yang dibagi dua menjadi, winter dan spring. Sementara untuk warm tone dibagi dua menjadi, autumn dan summer. Berikut karakteristik dan pengelompokan warna rambut seperti dilansir dari vixendaily.



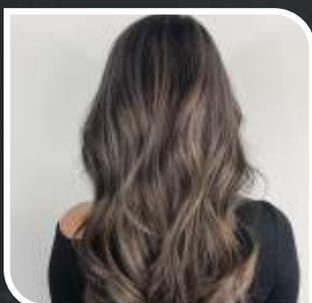
## COOL TONE-WINTER

Warna kulit yang lebih cerah, memiliki rona merah, kulit cenderung tidak mudah gelap, lahir dengan rambut hitam atau warna gelap lainnya. Warna yang cocok untuk kulit ini adalah jewel toned, solid, jet black, white, platinum blonde, dan violet red.



## WARM TONE-AUTUMN

Warna kulit yang bersinar, warna rambut bawaan lahirnya coklat tua, dan kulit mudah gelap. Warna rambut yang cocoknya adalah rich auburns, copper atau caramel tones, milk chocolate, beige blonde, honey blonde, dan golden blonde.



## COOL TONE-SPRING

Warna kulit yang lebih cerah dan memiliki rona merah muda atau kuning, kulit mudah gelap, dan lahir dengan rambut pirang. Warna yang cocok disandingkan dengan kulit ini di antaranya, light, icy blonde, platinum blonde, ashy blonde, dan ashy brown.



## WARM TONE-SUMMER

Warna kulit keemasan, dan kulit mudah gelap. Warna rambut yang cocok pada kulit ini adalah golden blonde, caramel brown, champagne blonde, toffee, atau warna cerah lainnya akan sangat masuk. Ayo buruan di coba !!! (ist)

## Mensos Rangkap (dari hal 1)

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui saat ini masih merangkap jabatan sebagai Walikota Surabaya. Untuk itu, Risma meminta izin kepada Presiden Joko Widodo kembali ke Surabaya untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo yang telah dibangun selama 10 tahun ini.

"Karena masih merangkap walikota, untuk sementara waktu, saya sudah izin ke presiden. Saya cuma ingin meresmikan jembatan yang ada air mancurnya itu, sayang kalau saya enggak meresmikan itu," kata Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Risma juga berencana meresmikan museum olah raga saat pulang ke Surabaya. Politikus PDIP itu menyebut terdapat jersey legenda bulu tangkis Budi Hartono dan raket milik atlet Alan Budikusuma di dalam museum tersebut. "Saya juga pulang dan meresmikan museum olah raga, untuk anak-anak Surabaya," kata Risma. Untuk diketahui, masa jabatan Risma sebagai wali kota Surabaya diketahui masih tersisa hingga Februari 2021.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf, Risma harus mundur sebagai Walikota Surabaya. "Tidak bisa rangkap. Makanya Wakil wali Kota Surabaya (Whisnu Sakti Buana) akan jadi Plt Walkot sampai pelantikan (paslon terpilih) nanti," ucap Asep.

Ia menyatakan adanya rangkap jabatan menimbulkan beberapa implikasi negatif. "Conflict of interest, kedua kemungkinan ada (posisi) yang dikorbankan, tidak fokus. Ketiga tertib administrasi, penggajian dobel-dobel, makanya enggak boleh ada rangkap," kata Asep.

Untuk itu, Asep menyatakan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, harus segera memberhentikan Risma dari jabatan Walkot Surabaya sesuai Pasal 78 ayat (2) huruf (g) yaitu memberhentikan kepala daerah karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kemendagri harus segera mempercepat pemberhentian Risma sebagai wali kota. Tidak boleh ada Keppres berlaku dua-duanya karena dua-duanya (menteri dan wali kota) pejabat negara," tutup Asep.

Pergantian jabatan ke Wakil Walikota Surabaya bisa terjadi setelah Risma mengajukan pengunduran diri secara resmi. Proses pergantian itu diatur dalam pasal 173 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ayat (4) menyebut DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pengangkatan wakil kepala daerah ke menteri dalam negeri lewat gubernur.

Jika dalam 5 hari sejak penyampaian usulan oleh DPRD gubernur tidak meneruskan, maka menteri berwenang untuk menetapkan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah. Jika dalam 10 hari DPRD tidak mengajukan usul, maka gubernur berwenang mengajukan usulan ke menteri.

Hal senada diungkapkan pengamat Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. Dia

menilai keputusan Risma tidak ingin melepas jabatannya sebagai Walikota Surabaya meski sudah dilantik menjadi Mensos telah menciderai etika politik yang ada.

"Dari sisi etika disitu pasti akan terjadi conflict of interests karena pasti ada yang akan didahulukan," ungkap Wawan. Karena itu, secara etika seharusnya Risma memilih untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, jabatan Menteri Sosial ini adalah jabatan tinggi dan terdapat amanah besar dari Presiden Jokowi terhadap Risma. "Paling penting ini masalah etika seolah-olah haus jabatan. Mensos ini adalah jabatan sangat tinggi jadi menteri level sangat tinggi, mending jadi menteri. Beliau harus konsentrasi karena tentu ada harapan besar Presiden terhadap Mensos baru setelah Mensos sebelumnya sudah terkena OTT terkait dana bansos Covid-19. Ini hukan hanya pertarungan Pak Jokowi tapi juga PDI Perjuangan," pungkasnya.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Jempin Marbun mengatakan Tri Rismaharini tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai walikota Surabaya pascadilantik menjadi

Menteri Sosial (Mensos). "Kami dapat informasi dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) lewat BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Surabaya. Jadi yang dipakai adalah Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, bukan mengundurkan diri, tapi diberhentikan oleh mendagri," kata Jempin, Rabu (23/12).

Status hukum jabatan Risma akan dijadikan Gubernur Jawa Timur untuk menunjuk pelaksana tugas dan selanjutnya mengangkat Wali Kota Surabaya pengganti Risma. Di Pemkot Surabaya, kata Jempin, memang ada Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, tapi wewenangnya sangat terbatas.

Ditanya terkait apakah ada batas waktu bagi Mendagri untuk mengeluarkan surat pemberhentian Tri Rismaharini, Jempin menjawab tidak batasan waktu. Namun, dia berharap surat pemberhentian itu bisa secepatnya dikeluarkan. Sebab mengemban tugas sebagai Mensos itu sangat berat, namun menjabat wali kota Surabaya juga berat. "Jika tidak ada surat pemberhentian dari Mendagri hingga masa jabatan Tri Rismaharini, tidak ada masalah hukum," kata mantan Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Jatim ini. (ist, ins)

## FORMASI TERBARU KABINET INDONESIA MAJU

### MENTERI:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muha'djir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Muhammad Lutfi (menggantikan Agus Suparmanto)
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Wahyu Sakti Trenggono (menggantikan Edhy Prabowo)
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar

20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin (menggantikan dr Terawan)
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Tri Rismaharini (menggantikan Juliarri Batubara)
25. Menteri Agama: Yaqut Cholli Qoumas (menggantikan Fachrul Razi)
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Uno (menggantikan Wishnutama)
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djajil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

### WAMEN:

1. Wakil Menteri Pertahanan: Letjen TNI Muhammad Herindra
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM: Edward Omar Sharif Hiariej
3. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono
4. Wakil Menteri Pertanian: Harvick Hasnul Qolbi
5. Wakil Menteri BUMN I: Pahala Nugraha Mansyuri

6. Wakil Menteri BUMN II: Kartika Wiroatmodjo
7. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
8. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
9. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
10. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
11. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
12. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
13. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
14. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
15. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo

### KEPALA BADAN DAN LAINNYA

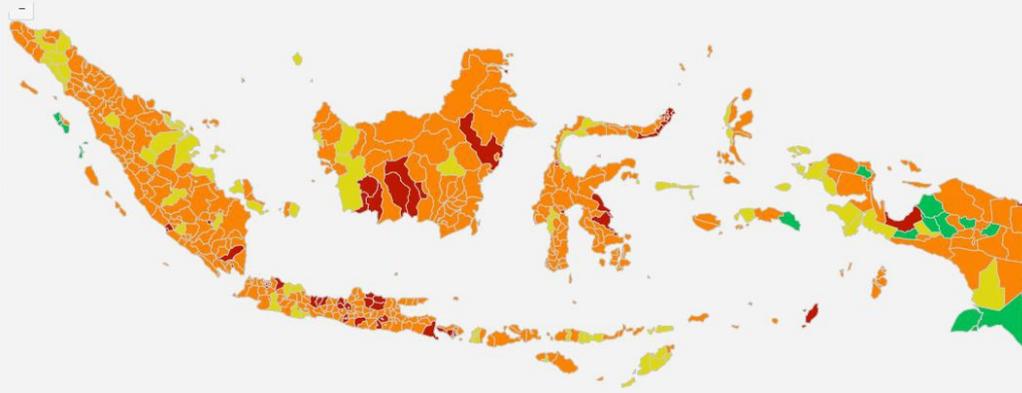
- Jaksa Agung: ST Burhanuddin
- Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
- Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
- Kepala BKPM: Bahilil Lahadalia
- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Irjen Petrus Reinhard Golose
- Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG): Hartono Prawiraatmadja

### KETERANGAN

**PUTIH** : Pejabat Lama  
**HIJAU** : Pejabat Baru  
per 23 Desember 2020

## RISIKO KENAIKAN KASUS

- **RISIKO TINGGI**  
60 (11,67%)
- **RISIKO SEDANG**  
378 (73,54%)
- **RISIKO RENDAH**  
64 (12,45%)
- **TIDAK ADA KASUS**  
8 (1,56%)
- **TIDAK TERDAMPAK**  
4 (0,78%)



# CORONA TAMBAH AKUT, NAKES BISA 'LEMPAR HANDUK'

Jakarta- Pandemi Covid-19 bukan hanya 'medan perang' bagi pemerintah, tapi juga seluruh rakyat. Satgas Covid-19 mengeluarkan peringatan bila ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) makin langka. Tak hanya itu SDM tenaga kesehatan (nakes) juga berpotensi 'lempar handuk' alias menyerah bila infeksi virus corona makin akut.

Untuk diketahui, Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mencatat 202 dokter meninggal dunia setelah terpapar virus corona per Selasa (15/12) lalu. IDI merinci sebanyak 101 dokter meninggal dalam rentang enam bulan, yakni Maret hingga Agustus. Sementara 101 dokter lainnya meninggal dalam kurun waktu empat bulan, mulai September hingga 15 Desember.

"Ya kita khawatir kalau terjadi jumlah penularan yang sangat tinggi, membanjiri faskes kita, bukan hanya ketersediaan tempat tidur, lho, ketersediaan SDM kita juga terbatas. Tempat tidur ada, tapi enggak ada yang ngurusin, dokternya, perawatnya, kan sulit juga," ujar Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sonny Harry B Harmadi, saat diskusi Talkshow BNPB 'Libur Aman Tanpa Bepergian', Rabu (23/12).

Menurut Sonny, kekhawatiran ini harus dipahami semua masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mawas diri dan meningkatkan kesadaran pada potensi penularan corona saat liburan.

"Jadi kita harap jangan sampai terjadi penularan tinggi. Harus jadi catatan di masa liburan ini, Harus ada kesadaran kolektif, kesadaran untuk jangan sampai di ujung tombak bobol sampai benteng terakhir, kalau benteng terakhir apalagi yang jadi penahan kita," ungkap Sonny.

Sejauh ini, kata Sonny, pihaknya telah dibantu 52.600 relawan dan duta perilaku yang bekerja mengedukasi masyarakat tentang perubahan perilaku dan protokol kesehatan

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengawasi kinerja para dokter selama pandemi. Upaya itu dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah lonjakan kematian dokter.

"Satgas sangat peduli dengan isu keselamatan dokter, dan berkomitmen untuk memperjuangkan keselamatan dokter melalui pembentukan tim khusus yang terdiri dari gabungan para pakar, pegiat profesi kedokteran, maupun bidang relawan," katanya.

Hari ini, Rabu (23/12) dilaporkan 7.514 orang positif virus corona. Sehingga total kasus mencapai 685.639. Sementara itu pasien sembuh juga bertambah sebanyak

5.981 orang. Akumulasinya menjadi 558.703 orang. Di sisi lain, kabar buruknya pasien meninggal juga bertambah 151 orang. Total kematian corona kini sudah mencapai 20.408 orang.

Hasil positif hari ini didapat dari pemeriksaan 52.672 sampel. Sementara jumlah suspek yang masih dipantau sebanyak 66.914 orang. Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah memperketat sejumlah aturan. Di antaranya dengan mewajibkan rapid test antigen untuk mereka yang bepergian di sejumlah wilayah. Namun Satgas mengimbau agar masyarakat tetap di rumah saja di tengah pandemi corona ini. Karena, potensi penularan selalu terjadi di kerumunan. (ist, ins)

## WILAYAH INDONESIA DENGAN RISIKO TINGGI PENULARAN CORONA

### Zona merah corona di Jawa Tengah

- Brebes
- Blora
- Kendal
- Kota Surakarta
- Kota Tegal
- Rembang
- Semarang
- Tegal
- Temanggung
- Wonogiri
- Wonosobo
- Pemalang

### Zona merah corona di Jawa Timur

- Banyuwangi
- Kediri
- Bojonegoro
- Kota Malang
- Tuban
- Tulungagung

### Zona merah corona Sumatera Selatan

- Kota Prabumulih
- ### Zona merah corona Sulawesi Utara
- Minahasa
  - Minahasa Utara
  - Bolaang Mongondow Timur
  - Bolaang Mongondow Selatan
  - Kota Manado
  - Kota Bitung
  - Kota Tomohon
  - Konawe Utara

### Zona merah corona Sulawesi Tenggara

- Kota Kendari
- Morowali

### Zona merah corona di Sulawesi Tengah

- Kota Palu
- Morowali

### Zona merah corona di Sulawesi Selatan

- Kota Palopo

### Zona merah corona Papua

- Nabire
- Kota Jayapura

### Zona merah corona NTT

- Kota Kupang

### Zona merah corona Maluku

- Maluku Tenggara Barat

### Zona merah corona Lampung

- Lampung Tengah
- Kota Bandar

### Lampung

- Kota metro

### Zona merah corona Kalimantan Utara

- Kota Tarakan

### Zona merah corona Kalimantan Timur

- Kutai
- Kartanegara

### Zona merah corona Kalimantan Tengah

- Katingan
- Kota Palangka Raya

### Zona merah corona Kalimantan Barat

- Kotawaringin Barat
- Kotawaringin
- Lamandau
- Sukamara

### Zona merah corona Jawa Barat

- Karawang
- Kota Depok

### Zona merah corona DKI Jakarta

- Jakarta Selatan
- Jakarta Timur

### Zona merah corona Yogyakarta

- Bantul
- Sleman
- Kota Yogyakarta

### Zona merah corona di Bengkulu

- Bengkulu Tengah
- Kota Bengkulu

### Zona merah corona di Bali

- Gianyar
- Tabanan
- Badung
- Jembrana